



RENCANA KERJA  
(RENJA)  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2023

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**DINAS KESEHATAN**

**Jl. Pamenang No. 1-C Telp. (0354) 683756 Fax. 680445**

***web : [dinkes.kedirikab.go.id](http://dinkes.kedirikab.go.id) - email : [kesehatan@kedirikab.go.id](mailto:kesehatan@kedirikab.go.id)***

**K E D I R I**

## KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Segala Puji Bagi Allah Yang Memberikan Rahmatnya kepada kami yang telah memberikan kekuatan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai pedoman Kerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program-program pembangunan kesehatan yang selalu berkelanjutan dan diarahkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadikan pedoman bagi karyawan-karyawati di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kerjanya. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini kurang dari sempurna, kritik dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait dengan perbaikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di tahun yang akan datang. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian Aamiin ...

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan .....	42
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	43
3.3. Program dan Kegiatan .....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .....	66
BAB V PENUTUP .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sampai dengan Tahun Berjalan .....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri .....	23
Tabel 2.4	Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2022 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Kediri .....	35
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kediri .....	40
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021 dan Perkiraan Maju tahun 2022 Kabupaten Kediri .....	52

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) yaitu merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan awal renja juga mengacu kepada renstra yang telah disusun SKPD pada tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut :

1. Renja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan merupakan terjemahan dari visi, misi dan juga program , yang dituangkan di dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana kerja dan Anggaran tahun 2023.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam renja dapat dijalankan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan 2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mengatasi masalah kesehatan nasional, sejalan dengan strategi pemerintahan/ pembangunan mewujudkan penyelenggaraan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang berkelanjutan yang penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKP SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

## **1.2.Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 29);

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai dasar untuk rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program Dinas Kesehatan.

2. meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya.
3. terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
5. meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang kesehatan.

#### **1.4.Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2023, meliputi :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Landasan Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

- II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Pemerintah Daerah
- II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
- II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
- II. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- III. 1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- III. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Pemerintah Daerah
- III. 3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi Renja atau pun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra**

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2021 semua SKPD mengalami penyesuaian nomenklatur kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, terkait dengan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 Dinas Kesehatan memiliki menjalankan 4 program 22 kegiatan. Pada rancangan awal renja tahun 2023 kali ini Dinas Kesehatan juga mengalami perubahan dalam program dan kegiatan guna menjalankan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam rancangan awal renja ini kami menyajikan hasil evaluasi renja tahun lalu dengan target tahun berikutnya akan disajikan dalam tabel yang berbeda.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian renstra SKPD s/d tahun 2022**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri**

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja SKPD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1						Urusan Kesehatan									
1						Bidang Urusan Kesehatan									
1	'01	'01	1.02	'01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan	78%	78%	78%	78%	100	80%	158%	99,5%
			1.02	'01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100	300	75%
			1.02	'01	201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2	100
			1.02	'01	201.06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan keuangan yang	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	100	15 laporan	45	100

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)									
			1.02	'01	202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	100
			1.02	'01	202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	400	100
			1.02	'01	202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>269</b>	69.5
			1.02	'01	202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>269</b>	69.5
			<b>1.02</b>	<b>'01</b>	<b>205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	100
			1.02	'01	205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	0	0	20	20	100	180	40	10
			1.02	'01	205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	80%	80%	80%	100	80%	240	60

			1.02	'01	206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
			1.02	'01	206 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	2	2	100	2	6	2
			1.02	'01	206 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	17	17	17	17	100	10	51	12,75
			1.02	'01	206 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	4	4	4	100	4	12	3
			1.02	'01	206 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	80	80	80	80	100	90	240	60
			1.02	'01	206 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	7	7	7	100	8	21	5.25
			1.02	'01	206 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2	2	2	2	100	3	6	3
			1.02	'01	206 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	500	500	500	100	600	1500	375
			1.02	'01	206 .09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun	150	150	150	150	100	200	450	112.5
			1.02	'01	208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>75</b>

						<b>Pemerintahan Daerah</b>									
			1.02	'01	208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	'01	208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	'01	208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	'01	208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			<b>1.02</b>	<b>'01</b>	<b>209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
			1.02	'01	209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
			1.02	'01	209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	10	10	10	100	400	10

			1.02	'01	209 .05	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	2	2	2	100	2	6	3
			1.02	'01	209 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	100	12	36	4
			1.02	'01	209 .09	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	3	3	100	3	9	2.25
			1.02	'01	209 .10	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	3	3	100	3	9	2.25
			<b>1.02</b>	<b>'01</b>	<b>20. 10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>75</b>
			1.02	'01	20. 10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37 puskesm as	37 puskesmas	37 puskesmas	37 puskesmas	100	37 puskesmas	37	100
			<b>1.02</b>	<b>'02</b>		<b>"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"</b>	Persentase Kecamatan STBM	1%	1%	1%	1%	100	2%	3	1
							Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	12%	12%	12%	100	49%	36	4
							Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,14	0,14	0,18	105	0.23		

						Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%	100	78,5%		
						Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	15%	15%	15%	100	17%		
						AKI	83,8	83,8	83,8	138,5	165	79,23		
						AKB	7,1	7,1	7,1	7,2	101	6,9		
		1.02	'02	201	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	75
		1.02	'02	201.02	Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	75
		1.02	'02	201.06	Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	100	38,1% (9/35)	50.1	12.52
		1.02	'02	201.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100% (397/397)	300	75
						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100% (30/30)	300	75
						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat	100%	100%	100%	100%	100%	100% (25/25)	300	75



			1.02	'02	202 .01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart ( K4 )	89%	89%	89%	81.38	91.4%	90%	260	65.75
			1.02	'02	202 .02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	92%	92%	92%	87.57	95.2%	94%	278	69.5
			1.02	'02	202 .03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	94%	94%	94%	86.91	92.45	95%	275.91	68.98
			1.02	'02	202 .04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	77%	77%	77%	77.53	100	80%	234	58.5
			1.02	'02	202 .05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	55%	55%	55%	77	140	70%	202	50.5
			1.02	'02	202 .06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%	39.87	39.87	100%	239	59.9
			1.02	'02	202 .07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	50%	50%	50%	53.51	107	55%	158.5	39.6
			1.02	'02	202 .08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	100%	100%	100%	25.96	25.96	100%	225	56.25
			1.02	'02	202 .09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	100%	100%	100%	92.78	92.78	100%	400	100
			1.02	'02	202 .10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	119.07	119.07	100%	319	79.75

			1.02	'02	202 .11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	100%	100%	25.38	25.38	100%	325	81.25
			1.02	'02	202 .12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	68.82	68.82	100%	368	92
			1.02	'02	202 .13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	0	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
			1.02	'02	202 .15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	88%	88%	88%	85%	100%	90%	276	69
							Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,35%	14,35%	14,35%	14,35%	100	15%	44	40
			1.02	'02	202 .16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	40 Pos	40 Pos	45	105	45 Pos		
			1.02	'02	202 .17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa ODF	62,30%	62,30%	62,30%	60	92	70,00%	222	169
			1.02	'02	202 .19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	6	6	5	90	6	18	
			1.02	'02	202 .20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100

			1.02	'02	202 .22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'02	202 .25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'02	202 .26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	70%	70%	70%	70%	100	85%	210	70
			1.02	'02	202 .27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	70%	70%	70%	70%	100	85%	210	70
			1.02	'02	202 .28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'02	202 .29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100	20	20	
			1.02	'02	202 .33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 pkm	37 pkm	37 pkm	37 pkm	100	37 pkm	37 pkm	100
			1.02	'02	202 .34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan di fasilitas kesehatan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'02	202 .35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna	3 puskesmas	3 puskesmas	3 puskesmas	5 puskesmas	100	5 puskesmas	5 puskesmas	100

			1.02	'02	202 .36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'02	202 .37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dan respon wabah			100%	100%	100%	100%	400	100%
			<b>1.02</b>	<b>'02</b>	<b>203</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan</b>	<b>37 pkm</b>	<b>37 pkm</b>	<b>37 pkm</b>	<b>37 pkm</b>	<b>100</b>	<b>37 pkm</b>	<b>37 pkm</b>	<b>100</b>
			1.02	'02	203 .01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	100	38 dokumen	38 dokumen	100
			1.02	'02	203 .02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	37 pkm	37 pkm	37 pkm	37 pkm	100	37 pkm	37 pkm	100
			<b>1.02</b>	<b>'02</b>	<b>204</b>	<b>"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"</b>	<b>Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
			1.02	'02	204 .03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik ( $\geq 89\%$ )	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'02	204 .04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	3	3	3	100	3	9	100
			<b>1.02</b>	<b>'03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA</b>	<b>Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>100</b>	<b>70%</b>	<b>210</b>	<b>70%</b>

					<b>MANUSIA KESEHATAN</b>										
			1.02	'03	201	<b>Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota</b>	<b>Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
			1.02	'03	201 .01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK Faskes tersebut	75%	75%	75%	75%	100	75%		75%
			1.02	'03	201 .02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'03	202	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
			1.02	'03	202 .01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'03	202 .02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standart ketenagakerjaan minimal di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'03	202 .03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Terlaksananya kegiatan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

					Daya Manusia Kesehatan	dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan								
		1.02	'03	203	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
		1.02	'03	203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	10	10	10	10	100	10	40	
		1.02	'04		<b>"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"</b>	<b>PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100</b>
		1.02	'04	201	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT</b>	<b>JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100</b>
		1.02	'04	201.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	20	20	20	20	100	20	20	100

					Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
			1.02	'04	203	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "	JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'04	203 .01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	120	120	120	120	100	120	360	90
			1.02	'04	206	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

					"										
			1.02	'04	206 .01	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'05		"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'05	201	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "	frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'05	201 .01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	'05	202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%



## **2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD**

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan yaitu sebesar 85% (Rp. 255.423.255.502,53 ) dari total dana Rp 300.467.979.726,-

Sedangkan untuk mengukur kinerja maka diukur Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2022.

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini Dinas kesehatan Kabupaten Kediri diwajibkan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKK bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Kediri, terdapat 8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan, dimana setiap tahun indikator ini diukur pencapaiannya dengan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Berikut akan disampaikan gambaran pencapaian Indikator Kinerja baik IKK maupun SPM.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

### **2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.**

Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengacu pada empat indikator pembangunan kesehatan, yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas), Angka/Umur Harapan Hidup, Status Gizi Masyarakat.

#### **A. Mortalitas (Angka Kematian)**

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Angka Kematian yang terkait adalah Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita serta Kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan dan bencana alam.

##### **1. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Angka Kematian Ibu menurun dengan signifikan hal ini karena ditahun ini merupakan tahun ke 3 pandemi sudah siap menghadapinya, dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari mutu dan kualitasnya . AKI turun dari angka 29 menjadi angka 11 ditahun 2022 Penyebab kematian ibu masih berkuat pada Pre Eklamsia sebanyak 45 %, perdarahan 27% sisanya penyebab lain-lain sebanyak 27%. Usia kematian ibu terbanyak pada golongan usia produktif sebanyak 73 %.

##### **2. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Angka Kematian bayi juga turun menjadi 122 bayi . dengan penyebab terbanyak kematian neonatal adalah Asfiksia 31,73%, BBLR 21,15 kelainan bawaan 25,96 dan sepsis 25, 96 %. Sedangkan untuk Post Natal Pneomonia 72,22%, diare 5,56% dan Kelainan kongenital sebanyak 5,56%

**B. Morbiditas (Angka Kesakitan)**

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan Diare

**C. Angka/Umur Harapan Hidup (UHH)**

Peningkatan Angka/Umur Harapan Hidup merupakan salah satu faktor yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi pada suatu wilayah. Angka/Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk dari sejak lahir pada suatu wilayah. Angka/Umur Harapan Hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Angka/Umur Harapan Hidup untuk Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 adalah 72.61 , tahun 2021 meningkat menjadi 72.65 sedangkan Tahun 2022 adalah 72.97

**D. Status Gizi Masyarakat**

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mengetahui status gizi balita adalah dengan menggunakan metode antropometri. Dalam metode antropometri, indeks yang umum dipakai adalah Berat Badan menurut Umur (BB/U) yang kemudian dikategorikan dalam Berat Badan Lebih ( $Z$  score  $> +2$  SD), Berat Badan Normal ( $Z$  score  $-2$  SD sampai  $+2$  SD), Berat Badan Kurang ( $Z$  score  $< -2$  SD sampai  $-3$  SD) dan Berat Badan Sangat Kurang ( $Z$  score  $< -3$  SD).

Berdasarkan data, jumlah balita yang ditimbang pada Tahun 2021 yaitu 88.95 balita. Sedangkan distribusi status gizi balita, sebanyak 95,0 % balita yang ditimbang mempunyai berat badan normal, 3,4 % balita mempunyai berat badan kurang, 0,6 % balita mempunyai berat badan sangat kurang dan 1,0 % balita mempunyai berat badan lebih.

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

2) Pelayanan kesehatan balita sakit

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun. (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

Adapun untuk menggambarkan keberhasilan program penimbangan di Posyandu di wilayah Kabupaten Kediri, salah satu ukuran yang digunakan adalah dari kenaikan berat badan balita. Sehingga ibu balita berusaha untuk memberi asupan yang seimbang agar pada bulan penimbangan berikutnya berat badan balitanya meningkat secara signifikan.

Upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi :

1. Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita, serta kepada ibu nifas.

Strategi penanggulangan Kurang Vitamin A dilaksanakan melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi yaitu kapsul vitamin A biru untuk bayi (6-11 bulan) sebanyak satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari atau Agustus, dan kapsul vitamin A merah untuk anak balita (1-5 tahun) sebanyak dua kali setahun yaitu tiap bulan Februari dan Agustus.

Berdasarkan laporan bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, cakupan pemberian kapsul vitamin A selama empat tahun terakhir sudah mengalami pencapaian sebanyak 90%.

Hasil pencapaian tersebut dipengaruhi oleh jumlah sasaran berdasarkan perkiraan penduduk, keaktifan petugas mendistribusikan kapsul vitamin A dan ibu balita yang menyadari akan pentingnya kapsul vitamin A bagi balitanya.

2. ASI eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai berusia 6 bulan tanpa diberi makanan lain selain ASI. ASI merupakan makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi

karena mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan bayi guna pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Berdasarkan profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri pencapaian pemberian ASI eksklusif masih cukup rendah, hanya berkisar antara 70-75%, sedangkan sampai akhir tahun 2022 masih tercatat 59.3% dari total bayi yang ada di Kabupaten Kediri.

Untuk menghitung cakupan ASI eksklusif dilakukan dengan cara menjumlah semua bayi mulai umur 0 – 6 bulan yang diberi ASI eksklusif dan dibandingkan dengan jumlah bayi yang diperiksa. Sosialisasi pemberian ASI eksklusif melalui lintas sektor dan program, posyandu, LSM, PKK, serta tokoh masyarakat sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Adanya penurunan capaian ASI eksklusif dalam satu tahun terakhir dikarenakan masih belum tertibnya pencatatan dan pelaporan dari desa.

### 3. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi yang dimaksud adalah status/keadaan gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur ( $BB/U < -3 SD$ ). Kasus gizi buruk dapat terjadi karena keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi (karbohidrat, protein dan lemak) dalam makanan sehari-hari dan atau disertai penyakit infeksi, sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan sering disertai dengan kekurangan zat gizi mikro (vitamin dan mineral).

Sampai dengan akhir Tahun 2022 balita gizi buruk yang ditemukan adalah sejumlah 1.141 orang atau sebesar 1.4 % semuanya mendapatkan intervensi dari Dinas Kesehatan maupun sumber lain berupa Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berupa susu balita.

Pada tahun 2022 Kabupaten Kediri menjadi daerah lokus stunting, dimana penanganan gizi buruk tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan tetapi merupakan tugas dari semua elemen masyarakat dan semua sektor terkait dengan penanganan stunting.

### 4. STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan output. Indikator outcome STBM

yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output STBM adalah sebagai berikut :

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
- b. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
- d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

Dalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu:

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment);
2. Peningkatan kebutuhan sanitasi (demand creation);
3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (supply improvement);

Untuk target Kecamatan STBM tahun 2022 adalah sebesar 2 % untuk capaian tahun 2022 ini belum tercapai masih 0% karena kab. Kediri dengan jumlah kecamatan ODF sebenarnya sudah 7 Kecamatan ( 27%) tapi dari desa-desa kecamatan tersebut masih proses verifikasi lapangan.

### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Koordinasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kediri dinilai masih perlu ditingkatkan.
- 2) Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan
- 3) Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata.

- 4) Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal.
- 5) Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
- 6) Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (*new emerging* dan *re-emerging*).
- 7) Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih perlu ditingkatkan.
- 8) Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
- 9) Aplikasi sistem pelaporan kefarmasian yang sering mengalami perbaikan serta sosialisasi aplikasi yang belum merata
- 10) Masih kurangnya prosentase Desa Siaga Kembang yang menjadi Paripurna
- 11) Belum tercapainya target pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil
- 12) Belum tercapainya cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan
- 13) Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan masih perlu ditingkatkan
- 14) Belum optimalnya penurunan AKI dan AKB
- 15) Kebutuhan masyarakat akan air minum yang memenuhi syarat kesehatan semakin tinggi

Berbagai hambatan yang ada tentunya akan memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja yang dituangkan dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hambatan lain adalah bahwa pencapaian indikator makro seperti untuk SDGs yaitu Angka/Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Status Gizi bukan hanya tergantung pada sektor kesehatan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikontribusikan pula dari sektor lain. Oleh karena itu perencanaan program yang komprehensif dengan melibatkan sektor terkait menjadi sangat penting untuk mengungkit keberhasilan pencapaian indikator yang ditetapkan.

### **2.3.3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Peran Pembangunan di bidang Kesehatan mengacu pada strategi pembangunan nasional bidang kesehatan, sedangkan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Dari hasil analisis terhadap hal tersebut di atas diperoleh issue- issue strategis sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dan rujukan yang berfokus

- pada upaya promotif dan preventif;
2. Pemenuhan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan;
  3. Optimalisasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
  4. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui;
  5. Pemerataan akses layanan kesehatan warga miskin termasuk jaminan Kesehatan
  6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka penurunan AKI dan AKB;
  7. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat;

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam melakukan telaahan terhadap rencana kerja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2023 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Kesehatan dan juga tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan. Review terhadap RKPD meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri berupa RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Masyarakat.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Kediri**

No.	Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun				tahun		tahun		
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13		
1	Angka Kematian Ibu	-	56.58	64,67	60,63	60,63	56,58	138.5	57	61	61	
2	Angka Kematian Bayi	-	7.00	7,6	7,3	7,3	7	7.2	6.4	6	6	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83.75%	84	85	85	85	81.01	81.21	84.62	84.62	
4	Persentase Keluarga Sehat	-		100%	100%	100%	100%	100	100			
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		93	94	94	95	81.3	76,92	92.89	92.89	
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		95	96	96	97	87.57	78,70	94.38	94.38	
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		97	98	98	99	86.91	80,94	96.52	96.52	
8	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		82	84	84	86	77.53	78,98	84.90	84.90	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	77.00	83,29	95.82	95.82	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	39.87	42,41	28.33	28.33	
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		66%	67%	67%	68%	53.51	67,68	69.71	69.71	
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	25.96	39,64	19.29	19.29	

13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%		100%	100%	100%	100%	92.78	137,53	29.40	29.40
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%		100%	100%	100%	100%	119.07	118,61	100	100
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	100%		45%	50%	55%	60%	25.38	65,08	100	100
16	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%		60%	65%	70%	75%	68.82	89,36	87.76	87.76

**TABEL 2.3**  
**Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023**  
**Kabupaten Kediri**

NO	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Cakupan penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	160.883.379.069	"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Cakupan penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	151.361.777,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	201.703.025,00	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	240.180.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95.250.027.614,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	85.940.246.883,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	909.965.180,00	Administrasi Umum	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan	100%	1.075.677.250,00	

						Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	973.865.730,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.115.564.400,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	868.381.453,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	695.295.122,00	
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinkes	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	100%	59.310.771.457,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinkes	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	100%	62.947.123.694	
	<b>"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"</b>	Dinkes	Persentase Kecamatan STBM	<b>100%</b>	<b>92.192.747.079,00</b>	<b>"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"</b>	Dinkes	Persentase Kecamatan STBM	<b>100%</b>	<b>73.333.364.010,00</b>	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			

								(FKTP) terakreditasi			
			Indeks Keluarga Sehat					Indeks Keluarga Sehat			
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi			
			Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin					Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin			
			AKI					AKI			
			AKB					AKB			
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	28.195.154.615,00
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	100%	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	100%	43.577.858.719,00

3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	498.847.676,00	
	"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%		"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	1.061.503.000,00	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Dinkes	<b>Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>2.614268.585,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Dinkes	<b>Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>2.144.853.200,00</b>	
1	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Dinkes	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	1	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Dinkes	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	19.874.400,00	
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	20.458.800,00	

3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	100%	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	100%	2.104.520.000,00
	<b>"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"</b>	Dinkes	<b>Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Akles Dan Optikal, Umot</b>	100%	<b>618.914.692,00</b>	<b>"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"</b>	Dinkes	<b>Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Akles Dan Optikal, Umot</b>	100%	<b>1.052.847.300,00</b>
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Dinkes	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	100%	75.488.825,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Dinkes	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	100%	186.525.000,00
2	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%	227.252.967,00	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%	307.252.700,00

3						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	100%	199.999.800,00	
4						Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes	Prosentase pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100%	54.315.800,00	
5	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga"	Dinkes	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	100%	316.172.900,00	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga"	Dinkes	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	100%	304.754.000,00	
	"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	Dinkes	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	65,03%	3.383.720.527	"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	Dinkes	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren,	65,03%	920.678.100,00	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kediri demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan, maupun dari SKPD lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD baik dari segi penjelasan kesehatan maupun pada saat melakukan rekapitulasi program dan kegiatan bersumber masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 Kabupaten Kediri tersaji dalam table berikut ini :

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Kediri**

N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesmas Kegiatan : 'Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kec. Kandangan	Pembangunan baru pustu jerukwangi	1 paket	
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesmas Kegiatan : Penyediaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih	Penyuluhan Kesehatan Tentang Bahaya Penyakit menular seksual	1 paket	
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesmas Kegiatan : Penyediaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo	Penyuluhan Penyakit menular seksual (HIV AIDS) bagi masyarakat desa Batuaji dan Sambi	1 paket	

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam menyusun Program dan Kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kesehatan yaitu terhadap Pembentukan Lingkungan Sehat dan Pembentukan Perilaku Hidup Sehat. Untuk terselenggaranya pembangunan berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga semua pihak yang terkait (stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya pengendalian penyakit
- c. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
- d. Meningkatnya jumlah, jenis kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
- e. Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- f. Meningkatnya sinergitas antar kementerian / lembaga pusat dan daerah
- g. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
- h. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimtek dan monev
- i. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- j. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- k. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kementerian kesehatan
- l. Meningkatkan system informasi kesehatan terintegrasi

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2020-2024 yang terjuang dalam renstra kementerian kesehatan tahun 2020-2024, adalah “meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi”

Adapun strategi RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan masyarakat hidup sehat

5. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

#### A. Tujuan

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri disusun dengan maksud untuk menyamakan persepsi seluruh aparat perencana yang ada di Dinas Kesehatan, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan kabupaten Kediri selama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah ” Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat”. Dengan Indikator tujuan adalah Umur Harapan Hidup (UHH).

#### B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Presentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	70%	72%	74%	76%	78%	80%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	59 % (21 Puskesmas paripurna 3 utama 18) RS paripurna 1; RS Utama 1	62 % (22 Puskesmas paripurna 3 utama 19) RS paripurna 1; RS Utama 1	63 % (23 Puskesmas paripurna 3 utama 20) RS paripurna 2;	72 % (26 Puskesmas paripurna 4 utama 22) RS paripurna 2;	80 % (29 Puskesmas paripurna 5 utama 24) RS paripurna 2;	87 % (39 Puskesmas paripurna 6 utama 26) RS paripurna 2;

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat,

pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian SDGs. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan pada tahun 2023 sebanyak 5 program dan 23 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut

:

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan puskesmas
		Pengembangan Puskesmas
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan DepotAir Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan(TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada MakananJajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Penerbitan Stiker Pembinaan padaMakanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"
"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

	Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat "
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya



**BAB IV.**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pencapaian SPM kesehatan. Adapun rencana kerja tahun 2023 dan kebutuhan anggaran tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

**TABEL 2.5**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Kediri**

Kode	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Urusan : Layanan Dasar								
	2. Persepsi Keluarga Sehat	Bidang : Kesehatan								
1.02.01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			100%	89,066,963,655	DAU		100%	161.725.948.415,00

<b>1.02.01.2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun</b>	<b>Dinkes</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>240,180,000</b>				<b>195.007.500,00</b>
1.02.01.2.01.01	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang disusun	Dinkes	4 Dokumen	40,727,000	APBD	Baru	6 Dokumen	40.727.000,00
1.02.01.2.01.06	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan pencapaian kinerja keuangan dan realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dinkes	12 Bulan	199,453,000	APBD	Baru	12 Bulan	154.280.500,00
<b>1.02.01.2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>85,940,246,883</b>	<b>APBD</b>	<b>Baru</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>86.780.194.733,00</b>
1.02.01.2.02.01	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	83,512,042,883	APBD	Baru	12 Bulan	83.512.042.883,00
1.02.01.2.02.02	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	1,284,754,000	APBD	Baru	12 Bulan	1.605.313.850,00
1.02.01.2.02.03	3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya anggaran untuk verifikasi keuangan SKPD selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	1,143,450,000	APBD	Baru	12 Bulan	1.522.570.000,00
1.02.01.2.02.05	4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya anggaran untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinkes	12 bulan		APBD	Baru	12 Bulan	9.328.000,00
1.02.01.2.02.07	5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya anggaran untuk penyusunan laporan keuangan bulanan	Dinkes	12 bulan		APBD	Baru	12 Bulan	130.940.000,00
<b>1.02.01.2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Selama 1 tahun</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,075,677,250</b>	<b>APBD</b>	<b>Baru</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.262.739.900,00</b>
1.02.01.2.06.01	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	133,839,700	APBD	Baru	12 bulan	130.692.400,00

1.02.01.2.06.02		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinkes	12 bulan	575,142,700	APBD	Baru	12 Bulan	750.359.600,00
1.02.01.2.06.03		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	12 bulan	53,233,400	APBD	Baru	12 Bulan	53.233.400,00
1.02.01.2.06.04		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Dinkes	12 bulan	200,992,650	APBD	Baru	12 Bulan	215.515.800,00
1.02.01.2.06.05		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinkes	12 bulan	75,984,100	APBD	Baru	12 Bulan	76.000.000,00
1.02.01.2.06.06		6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang – undangan	Dinkes	12 bulan	3,836,200	APBD	Baru	12 Bulan	3.836.200,00
1.02.01.2.06.08		7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Persediaan kunjungan tamu	Dinkes	12 bulan	32,648,500	APBD	Baru	12 Bulan	33.102.500,00
<b>1.02.01.01.2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,115,564,400</b>	<b>APBD</b>	<b>Baru</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.135.998.000,00</b>
1 02 01 2.08 01		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinkes	12 Bulan	1,560,000	APBD	Baru	12 Bulan	1.560.000,00
1.02.01.01.2.08.02		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinkes	12 bulan	426,767,400	APBD	Baru	12 Bulan	459.476.000,00
1.02.01.01.2.08.03		3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinkes	12 bulan	157,495,000	APBD	Baru	12 Bulan	96.000.000,00
1.02.01.01.2.08.04		4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum dan kantor	Dinkes	12 bulan	529,742,000	APBD	Baru	12 Bulan	578.962.000,00
<b>1.02.01.2.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya biaya pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>695,295,122</b>	<b>APBD</b>	<b>Baru</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>630.449.092,50</b>
1.02.01.2.09.01		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Dinkes	12 Bulan	25,000,000	APBD	Baru	12 Bulan	25.000.000,00

			PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan							
1.02.01.2.09.02		2.	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Dinkes	12 Bulan	281,503,950	APBD	Baru	12 Bulan	304.527.000,00
1.02.01.2.09.05		3.	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya pemeliharaan mebel dalam satu tahun	Dinkes	12 Bulan	25,000,000	APBD	Baru	12 Bulan	25.000.000,00
1.02.01.2.09.06		4.	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Dalam atu tahun	Dinkes	12 Bulan	146,000,000	APBD	Baru	12 Bulan	148.900.000,00
1.02.01.2.09.06		5	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinkes	12 Bulan		APBD	Baru	12 Bulan	50.751.600,00
1.02.01.2.09.10		6.	Pemeliharaan/RehabilitasiS arana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/RehabilitasiS arana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya	Dinkes	12 Bulan	217,791,172	APBD	Baru	12 Bulan	76.270.492,50
<b>1.02.01.2.10</b>			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Tersedianya dan penunjang pelayanan BLUD</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>73.371.494.140,25</b>	<b>APBD</b>	<b>Baru</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>59.310.771.457,00</b>
1.02.01.2.10.01		1.	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Tersedianya dan penunjang pelayanan BLUD	Dinkes	12 Bulan	73.371.494.140,25	APBD	Baru	12 Bulan	59.310.771.457,00
<b>1.02.02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)</b>			<b>70,855,133,692</b>				<b>83.781.008.719,00</b>
<b>1.02.02.2.01</b>			<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot</b>	<b>Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>26,856,491,615</b>		<b>Baru</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>32.149.948.000,00</b>

1 02 02 2.01 02			Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	7,200,000,000	APBD	Baru	12 Bulan	19.600.000.000,00
1 02 02 2.01 06			Pengembangan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan		APBD	Baru	12 Bulan	7.500.000.000,00
1 02 02 2.01 09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	884,782,950	APBD	Baru	12 Bulan	1.650.000.000,00
1.02.02.2.13		2.	Pengadaan Prasaranadan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pengadaan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Dinkes	12 Bulan	202,990,000	APBD	Baru	12 Bulan	1.703.000.000,00
1.02.02.2.14		3.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	12 Bulan	10,910,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Baru	12 Bulan	1.163.000.000,00
1.02.02.2.16		4.	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya pengadaan obat, vaksin	Dinkes	12 Bulan	1,100,000,000	APBD	Baru	12 Bulan	1.560.720.000,00
1.02.02.2.17		5.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Dinkes	12 Bulan	5,781,000,665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Baru	12 Bulan	3.277.093.000,00

							DAK NonFisik - BOKKB -BOK				
1.02.02.2.20		6.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	12 Bulan	423,700,000	APBD	Baru	12 Bulan	472.640.000,00
1 02 02 2.01 21			Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	Dinkes	12 Bulan	353,295,000	APBD	Baru	12 Bulan	223.495.000,00
<b>1.02.02.2.02</b>			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>42,466,531,446</b>				<b>49.899.973.043,00</b>
1.02.02.2.02.01		1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Dinkes	100%	210,620,000	APBD	Baru	100%	324.950.000,00
1.02.02.2.02.02		2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes	100%	141,740,000	APBD	Baru	100%	245.500.000,00
1.02.02.2.02.03		3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	100%	45,000,000	APBD	Baru	100%	253.400.000,00
1.02.02.2.02.04		4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes	100%	150,000,000	APBD	Baru	100%	878.900.000,00
1.02.02.2.02.05		5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes	100%	174,378,000	APBD	Baru	100%	200.175.000,00
1.02.02.2.02.06		6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes	100%	116,739,175	APBD	Baru	100%	161.677.500,00

1.02.02.2.02.07		7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes	100%	34,548,000	APBD	Baru	100%	89.540.000,00
1.02.02.2.02.08			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Dinkes	100%	127,590,000	APBD	Baru	100%	187.288.000,00
1.02.02.2.02.09			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus	Dinkes	100%	1,584,647,000	APBD	Baru	100%	1.605.648.500,00
1.02.02.2.02.10			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinkes	100%	161,187,500	APBD	Baru	100%	
1.02.02.2.02.11		8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes	100%	1,503,104,500	APBD	Baru	100%	2.129.540.000,00
1.02.02.2.02.12		9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes	100%	141,307,200	APBD	Baru	100%	153.425.000,00
1.02.02.2.02.13			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	Dinkes	100%	297,641,257	APBD	Baru	100%	529.860.257,00
1 02 02 2.02 14			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Dinkes	100%	13,058,000	APBD	Baru	100%	40.384.200,00
1.02.02.2.02.15		10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes	100%	846,780,000	APBD	Baru	100%	1.274.083.000,00
1.02.02.2.02.16		11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes	100%	110,008,500	APBD	Baru	100%	110.488.800,00

1.02.02.2.02.17		12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes	100%	693,783,100	APBD	Baru	100%	795.639.900,00
1.02.02.2.02.19		19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes	100%	109,852,000	APBD	Baru	100%	119.838.900,00
1.02.02.2.02.20		20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	Dinkes	100%	493,607,086	APBD	Baru	100%	234.309.286,00
1 02 02 2.02 21			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes	100%	83,625,000	APBD	Baru	100%	
1.02.02.2.02.22		22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes	100%	121,028,125	APBD	Baru	100%	223.405.500,00
1 02 02 2.02 23			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Pelayanan Upaya Kesehatan Khusus	Dinkes	100%	62,780,000	APBD	Baru	100%	56.458.000,00
1.02.02.2.02.25		25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes	100%	1,426,279,900	APBD	Baru	100%	1.916.117.000,00
1.02.02.2.02.26		26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	100%	30,581,227,200	APBD	Baru	100%	35.583.347.200,00
1.02.02.2.02.27		27.	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Presentase Pelaksanaan Deteksi dini Napza di fasyankes dan sekolah	Dinkes	100%	110,245,000	APBD	Baru	100%	110.526.000,00
1.02.02.2.02.28		28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinkes	100%	13,058,000	APBD	Baru	100%	14.768.000,00

1.02.02.2.02.29		29.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Presentase kabupaten sehat	Dinkes	100%	155,399,800	APBD	Baru	100%	379.174.000,00
1 02 02 2.02 31			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Penelitian Kesehatan Yang dilakukan dalam satu tahun	Dinkes	100%	8,955,000	APBD	Baru	100%	
1.02.02.2.02.35		35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinkes	100%	1,649,794,181	APBD	Baru	100%	928.323.000,00
1.02.02.2.02.36		36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinkes	100%	135,125,250	APBD	Baru	100%	272.182.400,00
1 02 02 2.02 37			Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dan respon wabah	Dinkes	100%	35,759,000	APBD	Baru	100%	30.264.000,00
1 02 02 2.02 38			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Dinkes	100%	461,732,000	APBD	Baru	100%	461.725.500,00
1 02 02 2.02 39			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Dinkes	100%	258,733,800	APBD	Baru	100%	149.884.000,00
1 02 02 2.02 40			Pelayanan kesehatan Tuberkulosis								137.440.600,00
1 02 02 2.02 41			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Dinkes	100%	407,197,872	APBD	Baru	100%	286.424.500,00
1 02 02 2.02 42			Pelayanan kesehatan Malaria								15.285.000,00
<b>1.02.02.2.03</b>			<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>				<b>470,607,631</b>				<b>498.847.676,00</b>
1.02.02.2.03.01		1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah pengelola data dan informasi kesehatan	Dinkes	100%	387,377,631	APBD	Baru	100%	415.617.676,00

1.02.02.2.03.02	2.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	100%	83,230,000	APBD	Baru	100%	83.230.000,00
1.02.02.2.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1,061,503,000</b>				<b>1.232.240.000,00</b>
1.02.02.2.04.03	1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes	100%	986,628,000	APBD	Baru	100%	1.157.365.000,00
1.02.02.2.04.04	2.	Penyiapan Perumusandan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusandan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinkes	100%	74,875,000	APBD	Baru	100%	74.875.000,00
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	Dinkes	70%	<b>1,722,772,800</b>	APBD	Baru	100%	<b>2.977.790.151,00</b>
		<b>Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota</b>	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	Dinkes	100%	<b>19,874,400</b>	APBD	Baru	100%	<b>24.779.500,00</b>
	1.	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK Faskes tersebut	Dinkes	100%	9,999,600	APBD	Baru	100%	10.304.500,00
	2.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	Dinkes	100%	9,874,800	APBD	Baru	100%	14.475.000,00
		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah</b>	<b>Dinkes</b>	<b>100%</b>	<b>134,818,800</b>	APBD	Baru	100%	<b>141.118.800,00</b>

	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	Dinkes	100%	9,799,800	APBD	Baru	100%	9.799.800,00
	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan	Dinkes	100%	125,019,000	APBD	Baru	100%	131.319.000,00
		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>Dinkes</b>	<b>100%</b>	<b>1,568,079,600</b>	APBD	Baru	100%	<b>2.811.891.851,00</b>
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Dinkes	100%	1,568,079,600	APBD	Baru	100%	2.811.891.851,00
<b>1.02.04</b>		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				<b>1,210,166,740</b>				<b>1.219.613.600,00</b>
<b>1.02.04.2.01</b>		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional</b>	<b>Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional</b>	<b>Dinkes</b>	<b>100%</b>	<b>273,122,660</b>	<b>APBD</b>	<b>Baru</b>	<b>100%</b>	<b>278.693.000,00</b>
1.02.04.2.01.02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes	100%	273,122,660	APBD	Baru	100%	278.693.000,00
1.02.04.2.03		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri</b>				<b>357,702,700</b>				<b>383.423.000,00</b>

		<b>Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>								
1.02.04.2.03.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	100%	357,702,700	APBD	Baru	100%	383.423.000,00
<b>1 02 04 2.04</b>		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>		Dinkes	100%	<b>199,999,800</b>				<b>103.586.800,00</b>
1 02 04 2.04 01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dinkes	100%	199,999,800	APBD	Baru	100%	103.586.800,00
<b>1 02 04 2.05</b>		<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan</b>				<b>54,315,800</b>				<b>60.387.800,00</b>

	<b>Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>									
<b>1 02 04 2.05 01</b>		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Dinkes	100%	54,315,800	APBD	Baru	100%	60.387.800,00
<b>1.02.04.2.06</b>		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PostMarket pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA</b>	Dinkes	100%	<b>325,025,780</b>	APBD	Baru	100%	<b>393.523.000,00</b>
1.02.04.2.06.01	1.	Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan	Dinkes	100%	325,025,780	APBD	Baru	100%	393.523.000,00
<b>1.02.05</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGKESEHATAN</b>	<b>Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)</b>	Dinkes	100%	<b>1,768,235,706</b>	APBD	Baru	100%	<b>2.482.516.706,00</b>
<b>1.02.05.2.01</b>		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota</b>	<b>frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun</b>	Dinkes	100%	<b>288,830,400</b>	APBD	Baru	100%	<b>135.061.000,00</b>
1.02.05.2.01.01	1.	Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyara kat	Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyara kat	Dinkes	100%	288,830,400	APBD	Baru	100%	135.061.000,00

1.02.05.2.02.05		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun</b>	Dinkes	100%	<b>593,805,200</b>	APBD	Baru	100%	<b>926.622.200,00</b>
1.02.05.2.02.01		1.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes	100%	593,805,200	APBD	Baru	100%	926.622.200,00
1.02.05.2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>885,600,106</b>				<b>1.420.833.506,00</b>
1.02.05.2.03.01		1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinkes	100%	885,600,106	APBD	Baru	100%	1.420.833.506,00
<b><u>TOTAL</u></b>							<b><u>164,623,272,593</u></b>				<b><u>180.465.318.401,50</u></b>

**BAB V**  
**PENUTUP**

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023. Renja Dinas Kesehatan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja merupakan hal yang penting dan sangat perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri. Keberhasilan dalam pelaksanaan program-program tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung juga dengan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai unsur pemerintah maupun masyarakat, supaya suatu rencana dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Dan pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, keseluruhan program ini diharapkan dapat diaktualisasi sesuai visi, misi Kabupaten Kediri dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam hubungan yang dinamis dan sinergi.

Kediri, - 2023  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEDIRI

**dr. Ahmad Khotib**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197003242002121003

**BUPATI KEDIRI**

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**